

Evaluasi Program Kotaku Dalam Penanganan Kumuh Kota Parepare (Studi Kasus: Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang)

Evaluation of The Kotaku Program in Handling Slums in Parepare City (A Case Study: Ujung Lare Village, Soreang District)

Chadiyah Arifin¹, Andi Muhibuddin², Syamsul Bahri³

¹Dinas Pekerjaan Umum Kota Pare-Pare

²Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

³Program Studi Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

E-mail: ijhapare@gmail.com

Diterima: 22 September 2022/Disetujui 30 Desember 2022

Abstrak. Penelitian ini sebagai evaluasi terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni yang belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun pemerintah setempat. Hal ini mengakibatkan kapasitas daya dukung sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya memberkan kontribusi terjadinya lingkungan permukiman padat dan kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare dan arahan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Terdapat 2 arahan terhadap Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare yaitu, membentuk rancangan anggaran untuk penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat agar permukiman kumuh semakin sempit dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berkurang dan pengoptimalan kelompok kerja agar masyarakat ikut aktif dalam penanganan.

Kata Kunci: Program Kotaku, Penanganan, Permukiman; Kumuh

Abstract. This research evaluates the fulfillment of the needs of settlement facilities and infrastructure in terms of housing and affordable and livable settlements that have yet to be fully provided, either by the community itself or the local government. This causes the carrying capacity of existing residential environmental facilities and infrastructure to begin to decline, contributing to dense and slum neighborhoods. This study aims to assess the Kotaku Program in handling slums in Ujung Lare Village and the direction of the Kotaku Program in handling slum settlements in Ujung Lare Village. This research uses descriptive analysis methods using qualitative and quantitative analysis. There are two directions to the Kotaku Program in handling slum settlements in Ujung Lare Village, namely, forming a budget plan for managing and solving problems regarding slum settlements that are following the needs of the local community so that slum settlements are getting narrower and Low-Income Communities (MBR) are reduced and optimizing working groups, So that the community is actively involved in handling it.

Keywords: Program Kotaku, Handling, Settlement, Slums

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Suatu kebijakan dan program diimplementasikan atau dilaksanakan maka selalu ada tuntutan evaluasi menyertainya. Sebaik, secepat serta seunggul apapun suatu kebijakan dan program, tidak akan menjadi sempurna tanpa evaluasi. Oleh karena itu antara kebijakan, program dan evaluasi sesungguhnya saling integral dan ketergantungan secara timbal balik. Evaluasi sebagai salah satu unsur dan

fungsi manajemen memainkan peran kunci dalam menentukan kesinambungan (continuity) dan keberlanjutan (sustainability) suatu kebijakan dan program, bahkan evaluasi memainkan atau sangat berperan di dalam menilai perencanaan, menentukan hasil dan dampak (output/outcome), kualitas, manfaat, dan efektivitas dari implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program khususnya dalam perencanaan wilayah dan kota.

Stufflebeam dalam Kirkpatrick (1998), mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (Fernandes dalam Muchsin dan Putra (2002); proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi (Djaali dan Mulyono dalam Yusuf, 2005); proses memahami, memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan” (Sukardi dalam Widoyoko, 2010); sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan” (Arikunto dan Abdul Jabar, 2010).

Evaluasi program merupakan penerapan model, teknik dan pengetahuan tentang evaluasi, untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan efektivitas program secara sistematis (Langbein & Felbinger (2006) dalam Tayibnapis, 2008:3). Evaluasi program adalah suatu kegiatan yang membutuhkan metode ilmiah untuk mengukur implementasi dan hasil program dengan tujuan untuk membuat keputusan (Rutman dalam Tayibnapis, 2000:12). Program harus diakhiri dengan evaluasi, guna memastikan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu: 1) menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, 2) mencari data yang relevan dengan penelitian, dan 3) menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut (Issac dan Michael dalam Tayibnapis, 2008).

Model-model evaluasi program relatif beragam antara lain: Provus Evaluation Model atau evaluasi kesenjangan program, CSE-UCLA Evaluation Model, CIPP Evaluation Model. (Fernandes dalam Tayibnapis, 2000). Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dikembangkan oleh Stufflebeam & Shinkfield (1985) sebagai sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan, dan terdiri atas: Context evaluation, Input evaluation, Process evaluation, dan Product evaluation, sehingga dipandang lebih komprehensif diantara model evaluasi lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil (Widoyoko, 2010).

Sehubungan dengan persoalan evaluasi tersebut, salah satu aspek yang bersifat urgen, vital dan strategis dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik khususnya di Indonesia adalah penanganan permukiman kumuh (slum's settlement management) terutama di daerah perkotaan. Konsepsi permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan). Permukiman kumuh sebagai daerah slum yang bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari segi sosial (Bergel dalam Wirotomo, 1997). Permukiman kumuh merupakan suatu kawasan dengan bentuk hunian

yang tidak terstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, dan MCK), bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler mengalami banjir tiap tahunnya (Santosa, 2007).

Permukiman kumuh dipandang sebagai permukiman atau perumahan bagi orang-orang miskin perkotaan yang berpenduduk padat, terdapat dipinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kondisinya kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan atau disebut wilayah pemukiman (Suparlan dalam Putro, 2011:22). Permukiman kumuh dianggap sebagai tempat dimana mayoritas anggota masyarakat kota berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim (Adisasmita, 2005).

Perkembangan lingkungan permukiman kumuh dan padat yang biasanya terjadi di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor urbanisasi. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini disebabkan oleh tidak seimbangnya peluang untuk mencari nafkah di daerah pedesaan, sehingga memunculkan adanya daya tarik kota yang dianggap mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan atau luar kota, sementara latar belakang kapasitas dan kemampuan para pendatang sangat marjinal seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, maka kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana permukiman juga akan meningkat, baik melalui peningkatan lahan maupun pembangunan baru.

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Masalah permukiman kumuh memang sangat terasa di kota besar di Indonesia. Menurut catatan dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah penduduk dalam kategori miskin di wilayah perkotaan menjadi 11, 16 juta jiwa pada maret 2020 dan mereka menempati Kawasan Kumuh seluas 55.000 ha.

Usaha Pemerintah dalam menangani permukiman kumuh (slum area) salah satunya dilakukan dengan program Kotaku. Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Kementerian PUPR No: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Program KOTAKU ini dilaksanakan secara nasional di 269 Kota/Kabupaten 34 Provinsi. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pada Kawasan kumuh melalui kegiatan pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi guna keberlanjutan masyarakat dipermukiman kumuh.

Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun pemerintah setempat. Hal itu mengakibatkan kapasitas daya dukung sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya memberikan kontribusi terjadinya lingkungan permukiman padat dan kumuh.

Selain itu, permukiman padat dan kumuh juga disebabkan oleh bencana alam. Dalam hal ini, masyarakat yang menjadi korban bencana alam tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga masyarakat berusaha sendiri mendirikan tempat tinggal sementara untuk mereka tempati. Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di bagian

VII dan VIII menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan permukiman kembali, dan tahapan penanganan kawasan kumuh yang terdapat didalam UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan pemerintah kota/kabupaten dalam melaksanakan pembinaan memiliki tugas menyusun: (i) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), (ii) Rencana Kawasan Permukiman (RKP) sebagai pelaksanaan tahapan perencanaan dalam penyelenggaraan permukiman dan (iii) kawasan perumahan/permukiman kumuh berdasarkan indikator dan kriteria sesuai karakteristik di wilayahnya masing-masing.

Kota Parepare secara administrasi mempunyai luas wilayah 99,33 km² terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan. Berdasarkan data BPS Kota Parepare tahun 2020 tentang luas wilayah dan kepadatan penduduk, kecamatan Bacukiki memiliki luas 66,7 km² dengan kepadatan penduduk 382,47 jiwa/km²; kecamatan Bacukiki Barat memiliki luas 13,00 km² dengan kepadatan penduduk 3.476,69 jiwa/km²; kecamatan Ujung memiliki luas 11,30 km² dengan kepadatan penduduk 2.994,96 jiwa/km²; kecamatan Soreang memiliki luas 8,33 km² dengan kepadatan penduduk 5.630,61 jiwa/km². Kota Parepare merupakan salah satu kota di provinsi Sulawesi Selatan selain Kota Parepare yang menunjukkan perkembangan pesat dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur perkotaan, Kondisi ini mengakibatkan laju urbanisasi masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu pertumbuhan permukiman akan ikut berkembang dan menciptakan permukiman dan lingkungan yang tidak layak.

Berdasarkan kebijakan dan kondisi empiris di lapangan, diperlukan suatu rencana tindak (action plan) untuk penanganan permukiman kumuh pada kawasan dengan tipologi perkotaan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya akan memberikan fasilitas berupa pendampingan dalam penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di Kabupaten/Kota sebagai bentuk pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh di Kabupaten/Kota-nya masing-masing dengan harapan sebagai berikut:

Percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh yang telah disepakati dalam SK Kumuh pada Kabupaten/Kota.

1. Keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor ke-Cipta Karya-an melalui kegiatan reguler sektoral.

2. Penguatan pemerintah Kabupaten/Kota melalui melibatkan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh bersama Badan Keswadayaan Masyarakat Kelompok Swadaya Masyarakat (BKM/KSM). Keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh

sebagai bagian dari strategi pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh.

Pemerintah Kota Parepare telah melaksanakan penanganan lingkungan permukiman kumuh hingga akhir tahun 2021, namun dari beberapa titik-titik kumuh yang telah dilakukan pembangunan ataupun pembenahan lingkungan yang telah dilakukan oleh program KOTAKU masih saja terlihat belum dapat menyelesaikan masalah permukiman kumuh itu sendiri, meskipun secara garis besar data menunjukkan bahwa luasan kumuh telah mengalami pengurangan sebesar 20,26% yaitu seluas 79,54 Ha dari luas kumuh awal pada tahun 2014 seluas 392,48 Ha selama kurun waktu 6 tahun.

Adapun Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan strategi bagi program Kotaku dalam menyelesaikan masalah permukiman kumuh di kota parepare dan untuk mengetahui dampak yang telah ada selama berjalannya program Kotaku dalam mengurangi luas Kawasan kumuh di kota Parepare.

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian evaluasi (Evaluative Research). Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan setelah program selesai atau berakhir. Adapun tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur seberapa besar ketercapaian sebuah program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Karena objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda Arikunto, 2004: 26. Kelebihan dari model evaluasi ini adalah bahwa evaluasi dilaksanakan secara on going evaluation, terutama dalam evaluasi formatif, sehingga selalu ada perbaikan-perbaikan dalam dalam proses pelaksanaan program.

Metode Penelitian yang digunakan dalam melakukan evaluasi adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Menurut (Nawawi, 1990) metode deksriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian atau masalah-masalah yang diteliti diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat. Pada metode deskriptif peneliti menyajikan data-data penelitian dan menganalisis temuan-temuan yang ada serta memberikan tinjauan kritis. Penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan tentang proses maupun hasil dari program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, dan mencoba untuk menilai keberhasilan program berdasarkan data yang diperoleh.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang Kota Parepare yang merupakan lokasi

prioritas penanganan kumuh perkotaan dengan luas 5,42 Ha yang terdiri dari 5 RW dan 15 RT memiliki luas, berdasarkan SK Kumuh Walikota Kota Parepare Nomor: 102 Tahun 2020 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Parepare. Deliniasi kumuh Kelurahan Ujung Lare berada di kawasan pusat perkotaan Parepare. Secara umum bercirikan kawasan padat penduduk, tingkat kepadatan bangunan sangat tinggi, minim daerah resapan dan ruang terbuka hijau. Tipologi deleniasi kumuh Kelurahan Ujung Lare masuk dalam kategori kumuh di wilayah dataran rendah.

c. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Itulah definisi populasi dalam penelitian, namun populasi juga adalah keseluruhan unit dalam atau kumpulan/kelompok ruang lingkup yang akan diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pada kawasan deliniasi kumuh di Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare berjumlah 903 jiwa (Data Program Kotaku Tahun 2022).

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Probability Sampling. Probability Sampling adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Sedangkan untuk teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah sampel random berstrata (Stratified Random Sampling), metode pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen (disebut strata), dan dari tiap stratum tersebut diambil sampel secara acak. Pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata tetapi sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya. Hal ini dilakukan karena anggota sampling pada penelitian ini heterogen (tidak sejenis) (Sugiyono, 2011).

Dengan rumus tersebut dapat dihitung ukuran sampel dari populasi 903 orang dengan mengambil tingkat kepercayaan/ketepatan $e = 10\%$, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{903}{1 + (903)(0,1)^2}$$

$$n = \frac{903}{10,03}$$

$$n = \frac{903}{10,03} = 90$$

Jumlah sampel dicukupkan menjadi 100 Orang

d. Variabel Penelitian

Variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar, dan sebagainya. Dari definisi inilah maka variabel adalah sebuah fenomena (yang berubah-ubah) dengan demikian maka bisa jadi tidak ada satu peristiwa di alam ini yang disebut variabel, tinggal tergantung bagaimana kualitas variabelnya (Burhan Bungin, 2005).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

a) Efektivitas (X1)

Efektivitas diukur berdasarkan tujuan dari Program Kotaku dengan output dari pelaksanaan Program Kotaku dengan indikator (1) Semakin sempitnya permukiman yang kumuh di Kelurahan Ujung Lare, (2) Terbentuknya Pokja PKP di Kelurahan Ujung Lare, (3) Terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, (4) Berkurangnya MBR di Kelurahan Ujung Lare, (5) Perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat di Kelurahan Ujung Lare.

b) Efisiensi (X2)

Efisiensi diukur berdasarkan seberapa besar usaha yang dilakukan oleh Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh dengan indikator (1) Masyarakat Kelurahan Ujung Lare mengetahui apa itu Kotaku, (2) Masyarakat Kelurahan Ujung Lare banyak mendapatkan informasi dari fasilitator Kotaku, (3) Masyarakat Kelurahan Ujung Lare aktif pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur

c) Kecukupan (Dampak/Manfaat) (X3)

Kecukupan diukur berdasarkan dampak/manfaat dari Program Kotaku selama pelaksanaan penanganan permukiman kumuh dengan indikator (1) Infrastruktur yang dibangun bermanfaat, (2) Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat bermanfaat, (3) Pemeliharaan infrastruktur yang dibangun baik.

d) Responsifitas (X4)

Responsifitas diukur berdasarkan persepsi masyarakat tentang kepuasan terhadap Program Kotaku dengan indikator (1) Kinerja pemerintah/Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare baik, dan (2) Anggaran yang disediakan sudah cukup.

e) Ketepatan (X5)

Ketepatan diukur berdasarkan kesesuaian pelaksanaan Program Kotaku terhadap kebutuhan masyarakat dengan Indikator (1) Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare, (2) Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare, (3) Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Kotaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare.

e. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggerakkan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Menurut Hariyanto dalam Pratiwi 2020 terdapat 2 aspek yang mempengaruhi permukiman kumuh yaitu, langsung dan tidak langsung.

Adapun aspek langsung yang dimaksud yaitu fisik sesuai dengan Permen PUPR RI Nomor 14 Tahun 2018 sebagai acuan untuk aspek fisik penanganan permukiman kumuh. Adapun data yang diperlukan untuk aspek fisik

terdiri atas 7 aspek prasarana yaitu: bangunan, prasarana jalan lingkungan, prasarana air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran. Sedangkan, data yang diperlukan untuk aspek tidak langsung yaitu aspek non fisik. Dalam penelitian ini aspek non fisik yang akan diteliti yaitu, sebagai berikut: Standar Petunjuk Pelaksanaan; Anggaran; dan Masyarakat.

2. *Data Sekunder*

Data Sekunder merupakan data dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber laporan tertulis, pustaka dan dokumen-dokumen lainnya dari instansi terkait, yaitu Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, Bappeda Kota Parepare, BPS Kota Parepare, PDAM Kota Parepare. Sekretariat KOTAKU Parepare.

f. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. (1) Pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data primer, yaitu: Kuesioner, Observasi Lapangan, Wawancara, dan Dokumentasi. (2) Pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan secara tidak langsung dari sumber/obyeknya. Data ini diperoleh melalui buku literatur, dokumen penelitian atau melalui kajian literatur sendiri dan Koordinator Kotaku. Selain itu dapat pula bersumber dari jurnal penelitian, maupun dari website resmi yang sesuai dengan objek penelitian. Adapun sumber data sekunder dapat diperoleh melalui: (a) Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare; (b) Kantor Bappeda Kota Parepare; (c) BPS Kota Parepare; (d) Kantor Kecamatan Soreang Kota Parepare; (f) PDAM Kota Parepare; dan (g) Sekretariat KOTAKU Parepare.

g. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah alat analisis dalam penelitian yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan atau mencapai tujuan dalam penelitian. Teknik analisis dalam penelitian sangat ditentukan oleh tujuan/output yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, serta jenis data yang telah diperoleh dalam pertanyaan penelitian. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain (1) Pada Rumusan Masalah Pertama Pertanyaan penelitian pertama yaitu bagaimana penilaian evaluasi Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang, dapat diketahui dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan kriteria evaluasi yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan (manfaat/dampak), responsifitas dan ketepatan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Untuk mendapatkan jawaban untuk variabel penelitian efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsifitas dan ketepatan Program Kotaku menggunakan teknik analisis scoring yang bertujuan untuk menilai tingkat efisiensi, kecukupan, responsifitas dan ketepatan dengan memberikan nilai atau harkat pada masing-masing indikator. Skala yang digunakan dalam teknik scoring ini

adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono 2015 dalam Pratiwi 2020). (2) Pada Rumusan Masalah Kedua Pertanyaan penelitian kedua yaitu bagaimana arahan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis kuantitatif menggunakan teknik analisis SWOT. Hasil penelitian 1 akan dijadikan dasar dalam penyusunan faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor strategis eksternal (peluang dan ancaman) ditambah hasil studi literatur. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknis analisis SWOT. Didalam analisis SWOT akan menganalisa faktor internal dan faktor eksternal menjadi Langkah strategi dalam mengoptimalkan kinerja yang lebih tepat (Rangkuti, 2013).

Analisis ini didasarkan pada logika dan kondisi yang ada di lokasi penelitian yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities). Disisi lain, meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats) yang akan dihadapi. Pada tabel EFAS (External Strategic Factors Analysis Summary) terdapat bobot dan rating, dimana bobot adalah penilaian yang diberikan kepada faktor peluang dan ancaman. Umumnya pemberian bobot dinilai berdasarkan tingkat kepentingan/harapan. Sedangkan rating adalah penilaian terhadap kinerja dari faktor peluang dan ancaman. Faktor-faktor strategis internal maupun eksternal disusun dimasukkan kedalam tabel faktor-faktor strategis internal (Internal Strategic Factor Summary/IFAS) dan tabel faktor-faktor strategis eksternal (External Strategic Factors Summary/EFAS).

Hasil perhitungan IFAS dan EFAS dapat menggambarkan kondisi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk mengatasi peluang dan ancaman yang dihadapi. Faktor internal dan eksternal kemudian dimasukkan ke dalam matriks SWOT. Matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimana penguang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki.

Berdasarkan matriks SWOT maka didapatkan 4 alternatif strategi yakni strategi S-O, strategi S-T, strategi W-O, dan strategi W-T. Strategi disusun berdasarkan nilai dari kriteria evaluasi Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Untuk menentukan strategi yang akan diprioritaskan dalam Arahan Program Kotaku dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Lare, perlu diketahui posisi IFAS dan EFAS dalam diagram SWOT.

Berdasarkan perhitungan antara skor bobot dengan skor rating dari masing-masing faktor internal dan eksternal akan memperlihatkan posisi faktor tersebut berada pada kuadran yang mana. Masing-masing kuadran dijelaskan sebagai berikut. Kuadran I, merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Kuadran II, pada bagian ini meskipun menghadapi berbagai ancaman, tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Kuadran III, Ketika menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di sisi lain, menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kuadran IV, merupakan

situasi yang sangat tidak menguntungkan, karena menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Hasil dan Pembahasan

a. Analisis Penilaian Efektivitas Program Kotaku

Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga dimaknai penilaian untuk melihat capaian hasil terhadap tujuan yang telah ditetapkan dalam program (William Dunn). Analisis efektivitas program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare dilakukan

untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan dari KOTAKU. Program dinilai efektif apabila tujuan yang diinginkan dalam program dapat tercapai. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner dengan masyarakat yang berada di Kelurahan Ujung Lare khususnya yang berada di deliniasi kumuh Kelurahan Ujung Lare dan didukung dengan data hasil observasi lapangan, maka jawaban dan pembobotan responden dari Kawasan deliniasi kumuh Kelurahan Ujung Lare yang telah didistribusi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Analisis Penilaian Efektivitas Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare

No	Tujuan Program Kotaku	Jawaban Responden	Bobot	Jumlah Responden	Persentase (%)	Nilai	Interval Penilaian (%)	Ket
1	Semakin sempitnya permukiman yang kumuh di Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	20	20%	80	71%	Berhasil
		Setuju	3	53	53%	159		
		Kurang Setuju	2	18	18%	36		
		Tidak Setuju	1	9	9%	9		
		Total		100	100%	284		
2	Terbentuknya Pokja dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	3	3%	12	42,5%	Tidak Berhasil
		Setuju	3	12	12%	36		
		Kurang Setuju	2	37	37%	74		
		Tidak Setuju	1	48	48%	48		
		Total		100	100%	170		
3	Terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh di Ujung Lare	Sangat Setuju	4	12	12%	16	37,25%	Tidak Berhasil
		Setuju	3	10	10%	30		
		Kurang Setuju	2	25	25%	50		
		Tidak Setuju	1	53	53%	53		
		Total		100	100%	149		
4	Berkurangnya MBR di Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	4	4%	16	38,5%	Tidak Berhasil
		Setuju	3	6	6%	18		
		Kurang Setuju	2	30	30%	60		
		Tidak Setuju	1	60	60%	60		
		Total		100	100%	154		
5	Perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	20	20%	80	60,5%	Cukup Berhasil
		Setuju	3	23	23%	69		
		Kurang Setuju	2	36	36%	72		
		Tidak Setuju	1	21	21%	21		
		Total		100	100%			
Nilai Efektivitas Program Kotaku							49,95%	Cukup Efektif

Sumber: Olah Data Penelitian, Tahun 2022

Terdapat 5 parameter untuk analisis penilaian efektivitas Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Semakin sempitnya permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare

Pemukiman kumuh adalah kawasan dimana hunian dan kondisi masyarakat tergolong sangat buruk. Kawasan hunian tersebut tidak memenuhi ketentuan standar yang berlaku seperti standar pemenuh kebutuhan, standar kerapatan bangunan, sarana pendukung hunian, kebutuhan air, sanitasi, dan sarana-prasarana penunjang kebutuhan ekonomi sosial lainnya. Semakin sempitnya permukiman kumuh menjadi salah satu penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh di Kelurahan Ujung Lare dimaksud semakin kecilnya luas kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Ujung Lare. Hal ini menjadi salah satu tujuan utama yang harus dicapai oleh Kotaku untuk mencapai keberhasilan. Masyarakat setempat di Kelurahan Ujung Lare khususnya yang berada di deliniasi kumuh, sangat mengapresiasi pemerintah yang selalu memperhatikan sehingga sekarang sudah dapat dikatakan tidak kumuh lagi. Dapat dibuktikan juga dalam SK Kumuh yang dikeluarkan oleh walikota Kota Parepare pada tahun 2020 Kelurahan Ujung Lare masuk dalam kategori kumuh rendah dengan luas kumuh 5,43 Ha, sedangkan pada tahun 2022

Kelurahan Ujung Lare masuk dalam kategori pencegahan permukiman kumuh (tidak kumuh).

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan jumlah responden untuk parameter efektivitas semakin sempitnya permukiman yang kumuh di Kelurahan Ujung Lare sebanyak 20 responden atau sebesar 20% menjawab sangat setuju. Sedangkan yang menjawab setuju ada sebanyak 53 responden atau sebesar 53%, 18 responden menjawab kurang setuju setuju atau sebesar 18% dan 9 responden atau sebesar 9% menjawab tidak setuju. Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai semakin sempitnya permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare memiliki nilai 71% atau berhasil terhadap efektivitas Program Kotaku.

b) Terbentuknya kelompok kerja (Pokja) PKP dalam mengatasi permukiman kumuh

Terbentuknya kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) dalam mengatasi permasalahan mengenai perumahan dan permukiman yang kumuh, yang dimaksud dalam hal ini terbentuknya suatu kelompok/organisasi/lembaga yang dibentuk oleh Kotaku untuk mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Program Kotaku sendiri telah membentuk BKM di Kelurahan Ujung Lare bernama BKM Gotong Royong yang berfungsi untuk mengkoordinir penanganan kumuh

yang ada di Kelurahan Ujung Lare khususnya yang ada di delinasi kumuh.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan jumlah responden untuk parameter efektivitas terbentuknya Pokja PKP dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare sebanyak 3 responden atau sebesar 3% menjawab sangat setuju, 12 responden atau sebesar 12% menjawab setuju, 37 responden atau sebesar 37% menjawab kurang setuju dan 48 responden atau sebesar 48% menjawab tidak setuju. Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai terbentuknya Pokja PKP di Kelurahan Ujung Lare dalam mengatasi permukiman kumuh memiliki nilai 42,5% atau tidak berhasil terhadap efektivitas Program Kotaku. Hal ini disebabkan oleh tidak optimalnya fungsi BKM yang ada di Kelurahan Ujung Lare, dengan sangat minimnya interaksi BKM/KSM dengan masyarakat lainnya yang mengakibatkan masyarakat lain tidak mengetahui terbentuknya BKM Gotong Royong di Kelurahan Ujung Lare.

c) Terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh

Terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh telah dilakukan oleh Kotaku dalam pembuatan RPLP. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan/desa untuk kurun waktu 5 tahun, disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka, serta mendukung kesiap-siagaan masyarakat terhadap bencana. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Ujung Lare yang diperbaharui setiap tahun.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan jumlah responden untuk parameter terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare sebanyak 12 responden atau sebesar 12% menjawab sangat setuju, 10 responden atau sebesar 10% menjawab setuju. Sedangkan 25 responden atau sebesar 25% menjawab kurang setuju dan 53 responden atau sebesar 53% menjawab tidak setuju.

Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh memiliki nilai 37,25% atau tidak berhasil terhadap efektivitas Program Kotaku. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya anggaran dari pemerintah pusat sehingga pada tahun selanjutnya, Kotaku tidak melaksanakan kegiatan di Kelurahan Ujung Lare.

d) Berkurangnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan jumlah responden untuk parameter berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Ujung Lare sebanyak 4 responden atau sebesar 4% menjawab sangat setuju dan 6 responden atau sebesar 6% menjawab setuju. Sedangkan 30 responden atau sebesar 30% menjawab kurang setuju dan 60 responden atau sebesar

60% menjawab tidak setuju. Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kelurahan Ujung Lare memiliki nilai 38,5% atau tidak berhasil terhadap efektivitas Program Kotaku. Hal ini disebabkan setelah dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilaksanakan, masyarakat hanya melakukan pelatihan tetapi tidak mendapatkan modal usaha untuk mengimplementasikan skill yang didapat dari pelatihan tersebut.

e) Perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat Kelurahan Ujung Lare

Perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih telah dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Ujung Lare khususnya yang berada di kawasan deliniasi kumuh, dengan bergotong royong setiap minggu membersihkan lingkungan mereka, dan tidak adanya penumpukan sampah di rumah karena adanya penjemputan sampah setiap sorenya oleh motor sampah. Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan jumlah responden untuk parameter perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih di Kelurahan Ujung Lare sebanyak 20 responden atau sebesar 20% menjawab sangat setuju, 23 responden atau sebesar 23% menjawab setuju. Sedangkan 36 responden atau sebesar 36% menjawab kurang setuju dan 21 responden atau sebesar 21% menjawab tidak setuju. Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih pada masyarakat di Kelurahan Ujung Lare memiliki nilai 60,5% atau cukup berhasil terhadap efektivitas Program Kotaku.

Berdasarkan hasil dari beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat keefektifan dari Program Kotaku, dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa nilai keefektifan memiliki nilai sebesar 49,95% atau dapat dikatakan Program Kotaku cukup efektif dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, khususnya yang berada pada kawasan deliniasi kumuh. Kelurahan Ujung Lare sebaiknya mempertahankan bahkan meningkatkan kondisi permukiman sekitar, dan Kotaku sendiri dapat menjadikan acuan Kelurahan Ujung Lare sebagai salah satu contoh untuk kelurahan ataupun kawasan kumuh lainnya. Peran Pemerintah dalam Program Kotaku harus tetap mengadakan evaluasi untuk melihat kondisi Kelurahan Ujung Lare selanjutnya, dan pengoptimalan kinerja dari BKM/KSM. Tidak tersedianya anggaran berupa modal usaha untuk masyarakat di Kelurahan Ujung Lare yang mengakibatkan tidak adanya implementasi dari masyarakat setelah dilakukannya pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat.

b. Analisis Penilaian Efisiensi Program Kotaku

Evaluasi terhadap efisiensi program dilakukan untuk melihat usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan program. Adapun bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh Program Kotaku dan berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner dengan masyarakat yang berada di Kelurahan Ujung Lare khususnya yang berada di delinasi kumuh Kelurahan Ujung Lare dan didukung dengan data hasil observasi lapangan, maka jawaban dan pembobotan responden dari Kawasan delinasi kumuh Kelurahan Ujung Lare yang telah didistribusi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini

Tabel 2 Analisis Penilaian Efisiensi Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare

No	Tujuan Program Kotaku	Jawaban Responden	Bobot	Jumlah Responden	Persentase (%)	Nilai	Interval Penilaian (%)	Ket
1	Masyarakat Kelurahan Ujung Lare mengetahui apa itu Kotaku	Sangat Setuju	4	15	15%	60	48%	Cukup Berhasil
		Setuju	3	10	10%	30		
		Kurang Setuju	2	27	27%	54		
		Tidak Setuju	1	48	48%	48		
		Total		100	100%	192		
2	Masyarakat Kelurahan Ujung Lare banyak mendapatkan informasi dari fasilitator Kotaku	Sangat Setuju	4	9	9%	36	46,75%	Cukup Berhasil
		Setuju	3	19	19%	57		
		Kurang Setuju	2	22	22%	44		
		Tidak Setuju	1	50	50%	50		
		Total		100	100%	187		
3	Masyarakat Kelurahan Ujung Lare aktif pada pelaksanaan Program Kotaku	Sangat Setuju	4	6	6%	24	40,75%	Tidak Berhasil
		Setuju	3	12	12%	36		
		Kurang Setuju	2	21	21%	42		
		Tidak Setuju	1	61	61%	61		
		Total		100	100%	163		
Nilai Efisiensi Program Kotaku							45,16	Tidak Efisien

Sumber: Olah Data Penelitian, Tahun 2022

Terdapat 3 parameter untuk analisis penilaian efisiensi Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Masyarakat Kelurahan Ujung Lare mengetahui apa itu Kotaku

Pengetahuan masyarakat terhadap Program Kotaku sangatlah penting selama pelaksanaan program, sehingga jika masyarakat mengetahui mengenai Kotaku, masyarakat akan lebih aktif dalam berpartisipasi selama pelaksanaan program. Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 responden atau sebesar 15%, yang menjawab setuju sebanyak 10 responden atau sebesar 10%. Sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 27 responden atau sebesar 27% dan sebanyak 48 responden atau sebanyak 48% menjawab tidak setuju.

Berdasarkan frekuensi data responden pada Tabel 2, diketahui bahwa masyarakat di Kelurahan Ujung Lare, khususnya di kawasan deliniasi kumuh masih kurang memiliki pengetahuan terhadap Program Kotaku. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat-perangkat Program Kotaku ataupun hal ini BKM. Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai bahwa pengetahuan masyarakat terhadap program Kotaku memiliki nilai 48% atau cukup berhasil terhadap efisiensi Program Kotaku.

b) Masyarakat Kelurahan Ujung Lare banyak mendapatkan informasi dari fasilitator Kotaku

Sumber informasi yang dimaksud ialah seberapa besar informasi yang didapatkan oleh perangkat/fasilitator program Kotaku. Hal ini menjadi penting dianalisis karena dapat mengetahui seberapa besar informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang Program Kotaku, dan secara tidak langsung hal ini bisa mempengaruhi efisiensi Program Kotaku. Diharapkan seperti pada tujuan Program Kotaku, masyarakat bisa berperan aktif jika banyak mendapatkan informasi terkait program tersebut dan ingin ikut andil dalam menuntaskan masalah-masalah lingkungan permukiman khususnya di Kelurahan Ujung Lare.

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden atau sebesar 9%, sebanyak 19 responden atau sebesar 19% menjawab setuju. Sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 22 responden atau sebanyak 22%, dalam hal ini masyarakat kurang mendapatkan informasi secara langsung

tetapi mengetahui program Kotaku karena adanya tulisan-tulisan Kotaku yang ada di tembok-tembok lorong, dan tulisan di motor sampah Kotaku. Hal ini dapat menambah informasi masyarakat tentang program Kotaku, meskipun tidak diberi informasi secara langsung baik dari fasilitator ataupun BKMnya masing-masing. Selanjutnya, ada sebanyak 50 responden atau sebesar 50% menjawab tidak setuju, karena sama sekali tidak mendapatkan informasi terkait program Kotaku. Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai bahwa sumber informasi terkait program Kotaku memiliki nilai 46,75% atau cukup berhasil terhadap efisiensi program Kotaku.

c) Masyarakat Kelurahan Ujung Lare aktif pada pelaksanaan program Kotaku

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan Program Kotaku, Pemerintah membuat program kegiatan secara terpadu antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk di dalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih bisa menggerakkan partisipasi masyarakat. Harapannya agar dapat mengikutsertakan semua kelompok ataupun individu masyarakat agar mau berkomitmen untuk bekerja sama mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan program. Berdasarkan tujuan Kotaku bahwa masyarakat salah satu nahkoda selama pelaksanaan Program Kotaku. Sehingga, keaktifan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Berdasarkan Tabel 2 sebanyak 6 responden atau sebesar 6% menjawab sangat setuju, 12 responden atau sebesar 12% menjawab setuju. Sedangkan 21 responden atau sebesar 21% menjawab kurang setuju, dan 61 responden atau sebesar 61% menjawab tidak setuju.

Berdasarkan jawaban tersebut dapat dinilai bahwa peran masyarakat terhadap pelaksanaan Program Kotaku memiliki nilai 40,75% atau tidak berhasil terhadap efisiensi Program Kotaku. Hal ini dikarenakan, masyarakat yang menganggap semuanya telah ada yang menanganinya, masyarakat hanya menikmati hasilnya saja, penyebab lainnya yaitu karena sibuknya masyarakat setempat akan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak memiliki waktu untuk ikut berpartisipasi.

Berdasarkan hasil dari beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat efisien dari Program Kotaku, dapat dilihat dari Tabel 2 bahwa nilai efisien sebesar 45,16% atau dapat dikatakan Program Kotaku tidak efisien dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan

Ujung Lare. Dalam hal ini, Kotaku sendiri masih harus lebih melibatkan masyarakat dalam proses penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, karena Kotaku sendiri didesain agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan bekerja bersama dengan pemerintah kelurahan, dan masyarakat berhak dan bertanggung jawab, dalam penataan permukimannya. BKM/KSM sebagai koordinator yang ditunjuk, harus lebih aktif lagi untuk memberi tahu masyarakat lainnya mengenai Program Kotaku sendiri itu seperti apa dan bagaimana.

c. Analisis Penilaian Kecukupan Program Kotaku

Analisis kecukupan atau manfaat Program Kotaku dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak/manfaat program baik itu dalam bentuk fisik dan non fisik yang dilaksanakan oleh Kotaku. Kecukupan bisa dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah bisa dirasakan serta mencukupi dalam berbagai hal. Wilayah yang tadinya terasa kumuh dan tidak layak dan mendapatkan bantuan untuk melakukan pembangunan akan terlihat bagus dan tertata sehingga itu sudah mencapai kata cukup. Adapun program-program yang dilaksanakan oleh Kotaku menjadi beberapa parameter dalam menilai manfaat Program Kotaku dapat dilihat pada Tabel 3 berikut

Tabel 3 Analisis Penilaian Kecukupan Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare

No	Tujuan Program Kotaku	Jawaban Responden	Bobot	Jumlah Responden	Persentase (%)	Nilai	Interval Penilaian (%)	Ket
1	Infrastruktur (jalan, drainase, air minum, motor sampah, motor pemadam kebakaran) yang dibangun bermanfaat	Sangat Setuju	4	65	65%	260	88,75%	Sangat Berhasil
		Setuju	3	25	25%	75		
		Kurang Setuju	2	10	10%	20		
		Tidak Setuju	1	-	-	-		
		Total		100	100%	355		
2	Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat bermanfaat	Sangat Setuju	4	10	10%	40	43,5%	Tidak Berhasil
		Setuju	3	11	11%	33		
		Kurang Setuju	2	22	22%	44		
		Tidak Setuju	1	57	57%	57		
		Total		100	100%			
3	Pemeliharaan infrastruktur yang dibangun baik	Sangat Setuju	4	49	49%	196	76,5%	Berhasil
		Setuju	3	19	19%	57		
		Kurang Setuju	2	21	21%	42		
		Tidak Setuju	1	11	11%	11		
		Total		100	100%	306		
Nilai Efisiensi Program Kotaku							69,58%	Cukup

Sumber: Olah Data Penelitian, Tahun 2022

Terdapat 3 parameter untuk analisis penilaian kecukupan Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Infrastruktur (jalan, drainase, air minum, motor sampah, motor pemadam kebakaran) yang dibangun bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan Kelurahan Ujung Lare

Salah satu faktor terciptanya kawasan pemukiman tidak layak huni disebabkan oleh kurangnya fasilitas pelayanan sarana dan infrastruktur disuatu lingkungan kawasan pemukiman. Kwanda dkk (2004) membagi infrastruktur kawasan pemukiman meliputi: jalan, air limbah, air hujan, air bersih, jaringan listrik dan telepon. Infrastruktur (perkotaan) adalah bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu sistem tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Adisasmita, 2012). Infrastruktur yang dibangun bermanfaat atau berdampak bagi masyarakat setempat khususnya yang berada di delinasi kumuh Kelurahan Ujung Lare. Adapun infrastruktur yang dibangun selama Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare pada tahun 2022, yaitu perbaikan dan rehab jalan lingkungan dan drainase lingkungan, pengadaan gerobak sampah, pengadaan motor sampah dan motor pemadam kebakaran dan pengadaan sambungan pipa jaringan air bersih/PDAM. Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui sebanyak 65 responden atau sebesar 65% sangat setuju infrastruktur yang dibangun bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan, 25 responden atau sebesar 25% menjawab

setuju dan 10 responden atau sebesar 10% menjawab kurang setuju. Berdasarkan jawaban diatas dapat dinilai bahwa infrastruktur yang dibangun bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan Kelurahan Ujung Lare dapat dinilai 88,75% atau sangat berhasil terhadap dampak/manfaat Program Kotaku (kecukupan). Infrastruktur jalan dinilai bermanfaat oleh masyarakat setempat karena sebelum adanya Program Kotaku, permasalahan yang dialami oleh Kelurahan Ujung Lare yaitu ada beberapa jaringan jalan yang masih berbentuk tanah dan paving block sudah rusak yang menyebabkan air tergenang dan becek apabila hujan, setelah dilakukan rehab ataupun dilakukannya pengerasan jalan masalah tersebut mulai berkurang. Untuk masalah drainase sendiri dilakukan pengerjaan normalisasi saluran drainase agar sedimen-sedimen dan limbah padat maupun cair yang ada pada saluran drainase bersih, setelah itu dilakukan pengerjaan menutup drainase (plat penutup) agar drainase tertanam dibawah jalan paving blok dan perbaikan konstruksi saluran drainase yang tidak sesuai dengan standar teknis.

Pengadaan pipa jaringan air bersih/PDAM yang dilakukan untuk masyarakat Kelurahan Ujung Lare khususnya delinasi kumuh yang belum menggunakan saluran PDAM. Selanjutnya, pengadaan motor sampah yang mempermudah proses pembuangan sampah rumah tangga karena sampah masyarakat akan dijemput setiap sore oleh motor sampah, sehingga tidak perlu lagi untuk membawa ke TPS terdekat. Menurut masyarakat setempat juga, pengadaan motor pemadam kebakaran sangatlah bermanfaat mengingat permukiman mereka yang padat dan

sempit sehingga motor pemadam sangatlah diperlukan jika terjadi kebakaran ataupun yang lainnya.

b) Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) bermanfaat

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) dilakukan untuk membangun gerakan Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui perubahan perilaku kolektif dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tingkat Kelurahan Ujung Lare, yaitu pembelajaran (*lesson learned*) dari kegiatan ekonomi pada Program ICDD bahwa pendekatan dalam mengembangkan kehidupan masyarakat tidak bisa hanya pendekatan akses terhadap *financial capital* melalui kegiatan pinjaman dana bergulir semata tetapi juga harus secara bersamaan (*terintegrasi*) dengan penguatan akses terhadap sumber daya lainnya yang disebut *livelihood asset*, meliputi: sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya sosial (*social capital*), sumber daya alam (*natural capital*), sumber daya fisik (*physical capital*) dan sumberdaya keuangan (*financial capital*). Pelatihan *Livelihood* berupa pelatihan membuat anyaman keranjang parcel buah dan pelatihan menjahit guna untuk melakukan pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi lokal yang dilakukan Program Kotaku dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan MBR di kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan Tabel 3 sebanyak 10 responden atau sebesar 10% menjawab sangat setuju, sebanyak 11 responden atau sebesar 11% menjawab setuju bahwa pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan oleh Kotaku sangat bermanfaat bagi mereka, karena selain itu bisa menjadi suatu pengetahuan baru buat mereka, mereka juga bisa memanfaatkannya sebagai salah satu usaha baru yang bisa menunjang perekonomian mereka. Sedangkan sebanyak 22 responden atau sebesar 22% menjawab kurang setuju dan sebanyak 57 responden atau sebesar 57% menjawab tidak setuju bahwa pelatihan peningkatan kapasitas yang dilakukan bermanfaat. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Ujung Lare dinilai hanya bermanfaat bagi sebagian warga saja atau dengan kata lain tidak tepat sasaran, karena banyak warga Kelurahan Ujung Lare yang tidak mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat ini. Dan ada juga yang berpendapat tidak adanya pemberian modal yang diberikan untuk mengimplementasikan pelatihan yang diberikan. Sehingga berdasarkan jawaban diatas pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dapat dinilai 43,5% atau tidak berhasil terhadap dampak/manfaat Program Kotaku.

c) Pemeliharaan Infrastruktur yang dibangun baik

Pemeliharaan infrastruktur yang dimaksud ialah bagaimana kondisi infrastruktur yang telah dipelihara dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Apakah kondisi infrastruktur tersebut tidak memiliki kerusakan atau telah mengalami kerusakan. Dalam hal ini, dapat juga diketahui bagaimana peran masyarakat Kelurahan Ujung Lare dan BKM/KSM dalam memelihara infrastruktur yang telah dibangun. Infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Pentingnya melakukan pemeliharaan ialah karena dalam pembangunan pemeliharaan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan secara berkala. Salah satu bentuk memelihara

dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun maka dibentuklah KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaatan) yang bertugas untuk melaksanakan rencana operasional dan pemeliharaan serta pendanaannya, selain itu KPP juga aktif mengajak masyarakat untuk selalu memelihara infrastruktur yang telah dibangun.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dinilai bahwa sebanyak 49 responden atau sebesar 49% menjawab sangat setuju, 19 responden atau sebesar 19% menjawab setuju. Sedangkan 21 responden atau sebesar 21% menjawab kurang setuju dan 11 responden atau sebesar 11% menjawab tidak setuju. Hal ini terlihat bahwa infrastruktur yang telah dibangun keadaannya masih cukup baik dan terawat, seperti paving blok jalan yang masih baik, penutup drainase juga yang masih baik, penutup drainase ada beberapa yang hilang di beberapa RT, untuk pemeliharaan motor sampah sendiri dilakukan oleh pihak Kelurahan sendiri. Kelurahan Ujung Lare sendiri khususnya di Kawasan deliniasi kumuh masih mengadakan kegiatan gotong royong setiap minggunya, beberapa masyarakat yang tidak mengikuti gotong royong pada umumnya disebabkan karena kesibukan masing-masing. Dalam hal ini juga, diperlukannya peran yang aktif oleh KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaatan) untuk mengawasi dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun oleh Kotaku. Selanjutnya berdasarkan distribusi jawaban pada kuesioner dapat dinilai bahwa pemeliharaan infrastruktur pada pemanfaatan hasil program Kotaku memiliki nilai yang cukup tinggi yakni 76,5% atau termasuk dalam kategori berhasil terhadap dampak/manfaat program Kotaku.

Berdasarkan hasil dari beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat efisien dari Program Kotaku, dapat dilihat dari Tabel 3 bahwa nilai kecukupan sebesar 69,58% atau dapat dikatakan Program Kotaku sangat cukup (sangat bermanfaat dan berdampak) dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Dalam hal ini, Kotaku sudah rata dalam memperhatikan masyarakat yang ada di Kelurahan Ujung Lare, khususnya di deliniasi kumuh, karena hampir setiap warga/masyarakat merasakan dampak dan manfaat dari Program Kotaku.

d. Analisis Penilaian Responsivitas Program Kotaku

Analisis responsivitas dilakukan untuk mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare. Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang dilakukan yang artinya tanggapan sasaran atas pelaksanaan suatu program yang dijalankan. Wiliam N. Dunn mengatakan bahwa suatu responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003: 437). Jadi keberhasilan suatu program yang dijalankan dapat dilihat dari tanggapan yang didapatkan dari masyarakat ketika program tersebut berjalan dan telah terlaksana. Penilaian responsivitas/kepuasan terhadap Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare meliputi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah/Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, dan persepsi masyarakat mengenai anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan Program Kotaku. Adapun beberapa parameter tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Analisis Penilaian Responsifitas Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare

No	Tujuan Program Kotaku	Jawaban Responden	Bobot	Jumlah Responden	Persentase (%)	Nilai	Interval Penilaian (%)	Ket
1	Kinerja Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare baik	Sangat Setuju	4	16	16%	64	70,25%	Berhasil
		Setuju	3	57	57%	171		
		Kurang Setuju	2	19	19%	38		
		Tidak Setuju	1	8	8%	8		
		Total		100	100%	281		
2	Anggaran Kotaku yang disediakan sudah cukup	Sangat Setuju	4	15	15%	60	47,75%	Tidak Berhasil
		Setuju	3	13	13%	39		
		Kurang Setuju	2	20	20%	40		
		Tidak Setuju	1	52	52%	52		
		Total		100%	191			
Nilai Efisiensi Program Kotaku							59%	Cukup Responsif

Sumber: Olah Data Penelitian, Tahun 2022

Terdapat 2 parameter untuk analisis penilaian responsivitas Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Kinerja pemerintah/kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare baik

Program KotaKu (Kota Tanpa Kumuh) adalah satu dari sejumlah upaya strategis pemerintah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Program ini membangun kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Pendapat masyarakat tentang kinerja yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan Kotaku sebagai platform dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare sangat penting untuk mengukur bagaimana pemerintah khususnya Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh. Berdasarkan Tabel 4 sebanyak 16 responden atau sebesar 16% menjawab sangat setuju dan 57 responden atau sebesar 57% menjawab setuju, dengan demikian masyarakat berpendapat bahwa kinerja pemerintah khususnya Kotaku sudah sangat baik karena sangat memperhatikan Kelurahan Ujung Lare, dibuktikan oleh pelaksanaan Program Kotaku yang dilakukan diharapkan dapat menurunkan status kumuh Kelurahan Ujung Lare, Sedangkan 19 responden atau sebesar 19% mengatakan kurang setuju dan 8 responden atau sebesar 8% menjawab tidak setuju dan menganggap bahwa kinerja pemerintah/Kotaku masih harus ditingkatkan karena menganggap masih banyak lagi yang harus diperhatikan di Kelurahan Ujung Lare. Berdasarkan jawaban pada Tabel 4 kinerja pemerintah/Kotaku mendapatkan nilai 70,25% atau berhasil terhadap responsivitas (persepsi masyarakat) dalam Program Kotaku.

b) Anggaran kotaku yang disediakan sudah cukup

Anggaran Program Kotaku sangat penting dalam pelaksanaan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh. Kelurahan Ujung Lare sendiri mendapatkan anggaran sebanyak Rp. 853.750.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun pelaksanaan 2022. Berdasarkan Tabel 4 untuk melihat apakah anggaran yang disediakan sudah cukup bagi masyarakat Kelurahan Ujung Lare untuk penanganan permukiman kumuh, sehingga sebanyak 15 responden atau sebesar 15% menjawab sangat setuju, 13 responden atau sebesar 13% menjawab setuju karena melihat perbaikan dan pengadaan infrastruktur serta

pelatihan kapasitas masyarakat yang mereka lihat sudah dapat mengurangi tingkat kekumuhan lingkungan mereka. Sedangkan 20 responden atau sebesar 20% menjawab kurang setuju dan 52 responden atau sebesar 52% menjawab tidak setuju, dengan alasan masih ada beberapa yang harus dibenahi lagi seperti pemasangan paving blok untuk lorong-lorong yang kecil dan lainnya, serta pelatihan peningkatan kapasitas yang lebih banyak variannya dan pemberian bantuan modal setelah dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat. Berdasarkan jawaban yang ada di Tabel 4 anggaran program Kotaku dapat dinilai 47,75% atau tidak berhasil terhadap responsifitas Program Kotaku.

Berdasarkan hasil dari beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat responsivitas atau persepsi masyarakat mengenai Program Kotaku, dapat dilihat dari Tabel 4 bahwa nilai responsivitas sebesar 59% atau dapat dikatakan Program Kotaku cukup responsif dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Dalam hal ini, masyarakat menilai pemerintah khususnya Kotaku sudah baik dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, walaupun disertai dengan penganggaran program Kotaku khusus untuk Kelurahan Ujung Lare yang dianggap masih belum cukup, karena sebagian dari masyarakat menilai sebenarnya masih ada yang harus dibenahi lagi dari Kelurahan Ujung Lare, tetapi mengingat anggaran yang terbatas, sehingga yang dikerjakan merupakan yang benar-benar yang paling dibutuhkan (prioritas) oleh masyarakat Kelurahan Ujung Lare.

e. Analisis Penilaian Ketepatan Program Kotaku

Ketepatan berguna untuk mengukur sejauh mana tujuan dari program telah tepat sasaran kepada wilayah tersebut ataukah belum. Untuk analisis ketepatan wilayah sasaran Program Kotaku dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap wilayah wilayah di tiap tiap kelurahan yang mendapatkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Adapun tujuan dari analisis ini untuk mengukur apakah program ini telah sesuai dengan kriteria dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Melihat dari wilayah wilayah Program Kotaku ini terbilang cukup kumuh dilihat dari tidak adanya drainase, serta penyediaan air bersih, jalan yang rusak sehingga membuat masyarakat kesusahan dalam melalui jalan tersebut.

Analisis ketepatan Program Kotaku dilakukan untuk menilai apakah semua program-program yang dibuat oleh

Kotaku telah tepat sasaran atau belum tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, khususnya yang berada di kawasan deliniasi kumuh Kelurahan Ujung Lare. Adapun

beberapa parameter yang digunakan dalam menilai ketepatan Program Kotaku dapat dilihat dalam Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5 Analisis Penilaian Ketepatan Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare

No	Tujuan Program Kotaku	Jawaban Responden	Bobot	Jumlah Responden	Persentase (%)	Nilai	Interval Penilaian (%)	Ket
1	Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	47	47%	188	84,25%	Berhasil
		Setuju	3	43	43%	129		
		Kurang Setuju	2	10	10%	20		
		Tidak Setuju	1	-	-	-		
		Total		100	100%	337		
2	Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masy. Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	8	8%	32	44,75%	Tidak Berhasil
		Setuju	3	10	10%	30		
		Kurang Setuju	2	35	35%	70		
		Tidak Setuju	1	47	47%	47		
		Total		100	100%			
3	Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Program Kotaku sesuai dengan kebutuhan masy. Kelurahan Ujung Lare	Sangat Setuju	4	12	12%	48	55%	Berhasil
		Setuju	3	27	27%	81		
		Kurang Setuju	2	30	30%	60		
		Tidak Setuju	1	31	31%	31		
		Total		100	100%	220		
Nilai Efisiensi Program Kotaku							61,33%	Cukup Berhasil

Sumber: Olah Data Penelitian, Tahun 2022

Terdapat 3 parameter untuk analisis penilaian ketepatan Program Kotaku di Kelurahan Ujung Lare, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Infrastruktur yang telah dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare

Kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat ialah partisipasi masyarakat dalam menilai apakah infrastruktur yang telah dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejak dari tahap perencanaan sampai program orientasinya adalah manfaat pembangunan bagi masyarakat dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bermukim di lingkungan tersebut. Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, diharapkan pembangunan infrastruktur dirasakan langsung manfaat dari segi ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yakni 47 responden atau sebesar 47% menjawab sangat saja dan 43 responden atau sebesar 43% menjawab setuju, dalam hal ini dapat diartikan masyarakat berpendapat bahwa infrastruktur yang dibangun adalah prioritas, sedangkan 10 responden lainnya atau sebesar 10% menjawab kurang setuju, sehingga berpendapat bahwa infrastruktur yang dibangun cukup dibutuhkan. Hal ini sesuai karena salah satu permasalahan utama pada kawasan deliniasi kumuh Kelurahan Ujung Lare ialah permasalahan drainase, persampahan, jalan lingkungan dan air bersih (air minum). Sedangkan pembangunan yang dilaksanakan oleh program Kotaku ialah pengerjaan drainase, jalan lingkungan, sambungan pipa air bersih/PDAM, dan pengadaan motor sampah. Sehingga dalam kata lain, pelaksanaan Program Kotaku dalam pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan atau sesuai prioritas kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare khususnya yang berada di kawasan deliniasi kumuh. Selanjutnya berdasarkan distribusi jawaban pada kuesioner dapat dinilai bahwa kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat pada evaluasi program Kotaku memiliki nilai yakni 84,25% atau termasuk dalam kategori berhasil terhadap ketepatan Program Kotaku.

b) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare

Kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat ialah partisipasi masyarakat dalam menilai apakah pelatihan dalam peningkatan kapasitas masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Kotaku sendiri telah melakukan beberapa pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di deliniasi kumuh Kelurahan Ujung Lare.

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa 8 responden atau sebesar 8% menjawab sangat setuju, 10 responden atau sebesar 10% menjawab setuju dan merasa pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang diadakan oleh Kotaku tepat bagi mereka, sedangkan 35 responden lainnya atau sebesar 35% menjawab kurang setuju dan 47 responden atau sebesar 47% menjawab tidak setuju dan merasa pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang diadakan oleh Program Kotaku tidak tepat bagi masyarakat di Kelurahan Ujung Lare. Selanjutnya berdasarkan distribusi jawaban pada kuesioner dapat dinilai bahwa ketepatan terhadap pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat memiliki nilai yakni 44,75% atau tidak berhasil terhadap ketepatan program Kotaku.

c) Penggunaan Anggaran dalam pelaksanaan Kotaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah. Penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Ujung Lare sangat diperlukan dalam pelaksanaan Program Kotaku, hal ini dikarenakan Program Kotaku harus selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Kawasan deliniasi kumuh Kelurahan Ujung Lare. Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa 12 responden atau sebesar 12% menjawab sangat setuju, 27 responden atau sebesar 27% menjawab setuju atau berpendapat bahwa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Program Kotaku telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare. Sedangkan

sebanyak, 30 responden atau sebesar 30% menjawab kurang setuju, 31 responden atau sebesar 31% menjawab tidak setuju dan berpendapat bahwa penggunaan anggaran masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Ujung Lare. Berdasarkan jawaban yang ada di Tabel 5 bahwa penggunaan anggaran dalam Pelaksanaan Kotaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare dapat dinilai 55% atau berhasil terhadap responsifitas Program Kotaku.

Berdasarkan hasil dari beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan mengenai Program Kotaku, dapat dilihat dari Tabel 5 bahwa nilai ketepatan sebesar 61,33% atau dapat dikatakan Program Kotaku cukup tepat dalam menentukan infrastruktur apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan penggunaan anggaran yang sesuai sehingga dapat mengurangi tampak kumuh dari permukiman mereka. Dalam hal ini, masyarakat berpendapat masih memerlukan beberapa pelatihan lainnya yang dapat mereka manfaatkan guna untuk diproduksi kembali dan keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan social, ekonomi bergulir, dan perbaikan infrastruktur lainnya.

f. Arahan Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Ujung Lare Kota Pare-Pare

Untuk mengetahui arahan untuk Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, dapat dianalisis menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan dan

membuat rekomendasi sehingga dapat diambil tindakan yang tepat sesuai dengan informasi yang telah diperoleh. Dengan diidentifikasinya kekuatan dan kelemahan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, hal ini dapat mengurangi kelemahan yang ada dan sekaligus dapat memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Tantangan dan peluang juga berlaku dalam hal ini, dimana tantangan dapat diperkecil sedangkan peluang yang ada diperbesar.

Adapun analisis terhadap kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare sesuai dengan hasil analisis yang ada di pertanyaan penelitian pertama, dalam analisis SWOT ini akan dirumuskan dan diperkuat yang mana merupakan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) atau faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang akan digunakan dalam analisis SWOT untuk menentukan arahan untuk Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare.

Tahapan analisis dalam analisis SWOT adalah memanfaatkan data yang telah dianalisis di pertanyaan penelitian pertama dan diperkuat oleh faktor lainnya. Tahapan pertama yang dilakukan adalah tahapan analisis dilakukan pembobotan terhadap setiap faktor internal dan eksternal atau disebut pembobotan IFAS dan EFAS. Hasil penelitian pertama dimasukkan dalam tabel faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor strategis eksternal (peluang dan ancaman).

Tabel 6 Faktor-faktor Internal Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Lare

Kekuatan	
1.	Perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat Ujung Lare
2.	Pemeliharaan infrastruktur yang dibangun baik
3.	Infrastruktur yang dibangun bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan Kelurahan Ujung Lare
4.	Kinerja Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare baik
5.	Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare
6.	Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Kotaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare
Kelemahan	
1.	Keterbatasan anggaran
2.	Tidak berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
3.	Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat tidak berhasil
4.	Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare
5.	Masyarakat Kelurahan Ujung Lare tidak aktif pada pelaksanaan Kotaku

Tabel 7 Faktor-faktor Eksternal Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Lare

Peluang	
1.	Semakin sempitnya permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare
2.	Terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) dalam mengatasi permukiman kumuh
3.	Terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh
Ancaman	
1.	Masyarakat kurang mendapatkan informasi dari fasilitator Kotaku
2.	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Kotaku

Sumber: Olah Data Penelitian, Tahun 2022

Selanjutnya penentuan faktor internal dan faktor eksternal Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare maka dapat ditemukan faktor kunci yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Faktor-faktor tersebut dievaluasi dalam matriks IFAS dan matrik EFAS. Adapun matriks IFAS dan matriks EFAS digunakan sebagai data masukan untuk menentukan alternatif arahan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare.

1. Matriks IFAS

Hasil penilaian faktor-faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan oleh responden disajikan pada Tabel 8.

2. Matriks EFAS

Hasil penilaian faktor-faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman oleh responden disajikan pada Tabel 9.

Tabel 8 Matriks IFAS Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Lare

No	Faktor-faktor Internal	Bobot	Rating	Skor Bobot (Bobot X Rating)
<i>Kekuatan/Strength</i>				
1	Perubahan gaya hidup yang sehat danbersih dari masyarakat Kelurahan Ujung Lare	0,15	2,67	0,37
2	Pemeliharaan infrastruktur yang dibangun baik	0,16	3,33	0,53
3	Infrastruktur yang dibangun bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan Kelurahan Ujung Lare	0,22	3,33	0,70
4	Kinerja Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare bai	0,17	3,33	0,56
5	Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare	0,19	2	0,38
6	Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Kotaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare	0,11	3,33	0,36
<i>Total Kekuatan/Strength</i>		1,00		3,00
<i>Kelemahan/Weakness</i>				
1	Keterbatasan anggaran	0,23	4	0,92
2	Tidak berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	0,18	2,67	0,48
3	Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat tidak berhasil	0,20	3	0,6
4	Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare	0,20	3	0,6
5	Masyarakat Kelurahan Ujung Lare tidak aktif pada pelaksanaan Kotaku	0,19	4	0,76
<i>Total Kelemahan/Weakness</i>		1,00		3,35
TOTAL IFAS				-0,35

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2022

Tabel 9 Matriks EFAS Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Lare

No	Faktor-faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor Bobot (Bobot X Rating)
<i>Peluang/Opportunities</i>				
1	Semakin sempitnya permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare	0,42	4	1,68
2	Terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) dalam mengatasi permukiman kumuh	0,31	4	1,24
3	Terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh	0,27	3,67	1,00
<i>Total Peluang/Opportunities</i>		1,00		3,92
<i>Ancaman/Threats</i>				
1	Masyarakat kurang mendapatkan informasi dari fasilitator Kotaku	0,5	2,33	1,17
2	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Kotaku	0,5	2	1,00
<i>Total Ancaman/Threats</i>		1,00		2,17
TOTAL EFAS				1,75

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2022

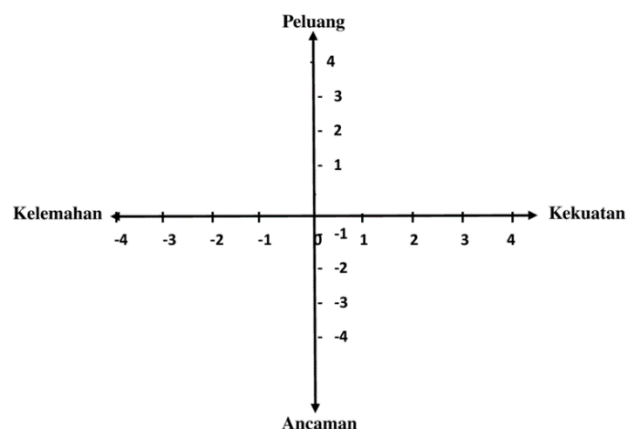
Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa skor kekuatan sebesar 3,00 dan jumlah skor kelemahan sebesar 3,35. Sehingga, diperoleh total keseluruhan dari faktor internal strategis sebesar -0,35 (negatif). Nilai tersebut berarti bahwa faktor kelemahan yang dimiliki lebih dominan dibandingkan dengan faktor kekuatan. Sedangkan, dari Tabel 9 Menunjukkan bahwa jumlah skor peluang

sebesar 3,92 dan jumlah skor ancaman sebesar 2,17. Sehingga, diperoleh total keseluruhan dari faktor eksternal strategis sebesar 1,75 (positif). Nilai tersebut berarti bahwa faktor peluang lebih dominan dibandingkan dengan faktor ancaman. Sehingga, posisi arahan pada diagram SWOT ditunjukkan pada gambar berikut.

Kuadran 3 (W-O)

- Mendukung Strategi turn around

Peluang yang sangat besar berhadapan dengan kelemahan internal yang kuat. Strategi yang dilakukan adalah meminimalisir permasalahan internal untuk merebut peluang yang ada



Gambar 1. Diagram SWOT Arahan Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Lare

3. Matriks SWOT

Berikut adalah hasil analisis matriks SWOT berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil identifikasi

faktor internal dan faktor eksternal Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Hasil analisis menggunakan SWOT dan menghasilkan

empat alternatif strategi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10 Matriks SWOT Arahan Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Lare

		FAKTOR INTERNAL	
		Kekuatan/Strength (S)	Kelemahan/Weakness (W)
FAKTOR EKSTERNAL	Identifikasi Faktor-faktor	1. Perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat Kelurahan Ujung Lare 2. Pemeliharaan infrastruktur yang dibangun baik 3. Infrastruktur yang dibangun bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat Kelurahan Ujung Lare 4. Kinerja Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare baik 5. Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare 6. Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Kotaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare	1. Keterbatasan anggaran 2. Tidak berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 3. Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat tidak berhasil 4. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Ujung Lare 5. Masyarakat Kelurahan Ujung Lare tidak aktif pada pelaksanaan Kotaku
	Peluang/Opportunities (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
	1. Semakin berkurangnya permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare 2. Terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) dalam mengatasi permukiman kumuh 3. Terbentuknya rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh	1. Mempertahankan dan meningkatkan perubahan gaya hidup yang sehat dan bersih agar permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare semakin berkurang (S1, dan O1) 2. Kelompok kerja (Pokja) bersama masyarakat setempat memaksimalkan pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun (S2, S3, S4 dan O2) 3. Mengevaluasi rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh untuk perencanaan program dan anggaran yang ada lebih lanjut (S5, S6, dan O3)	1. Membentuk rancangan anggaran untuk penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat agar permukiman kumuh semakin berkurang dan MBR berkurang (W1, W2, W3, W4, O1, dan O3) 2. Pengoptimalan Kelompok Kerja (Pokja) agar masyarakat ikut aktif dalam penanganan permukiman kumuh (O2, W5)
	Ancaman/Threats (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Masyarakat Kelurahan Ujung Lare kurang mendapatkan informasi dari fasilitator Kotaku 2. Kurangnya Pengetahuan masyarakat Kelurahan Ujung Lare tentang Kotaku	1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Kotaku, agar masyarakat lebih paham tentang Kotaku dan mempertahankan gaya hidup yang bersih dan sehat untuk pemeliharaan infrastruktur lebih lanjut (S1, S2, T1, dan T2) 2. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja Kotaku dalam pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa itu Kotaku, dan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat serta penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (S3, S4, S5, S6, T1, dan T2)	1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang program pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat agar dilakukannya pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat setempat (W2, W3, W4, T1, dan T2)	

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2022

4. Strategi Arahan Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Lare

Berdasarkan hasil analisis evaluasi Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare selanjutnya diolah menggunakan analisis SWOT, menghasilkan arahan untuk Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, yaitu terletak pada arahan W-O (Weakness – Opportunity), arahan tersebut dibuat untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Adapun arahan tersebut menghasilkan 2 ide arahan untuk Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, sebagai berikut:

- a. Membentuk rancangan anggaran untuk penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat agar permukiman kumuh semakin sempit dan MBR berkurang

Program Kotaku cukup tepat dalam menentukan infrastruktur apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan penggunaan anggaran yang sesuai sehingga dapat

mengurangi tampak kumuh dari permukiman mereka. Dalam hal ini, masyarakat berpendapat masih memerlukan beberapa pelatihan lainnya yang dapat mereka manfaatkan guna untuk diproduksi kembali dan keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan social, ekonomi bergulir, dan perbaikan infrastruktur lainnya.

Dalam hal ini, masyarakat menilai pemerintah khususnya Program Kotaku sudah baik dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, walaupun disertai dengan penganggaran program Kotaku khusus untuk Kelurahan Ujung Lare yang dianggap masih belum cukup, karena sebagian dari masyarakat menilai sebenarnya masih ada yang harus dibenahi lagi dari Kelurahan Ujung Lare, tetapi mengingat anggaran yang terbatas, sehingga yang dikerjakan merupakan yang benar-benar yang paling dibutuhkan (prioritas) oleh masyarakat Kelurahan Ujung Lare.

- b. Pengoptimalan Kelompok Kerja (Pokja) agar masyarakat ikut aktif dalam penanganan permukiman kumuh

Terbentuknya kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) dalam mengatasi permasalahan mengenai perumahan dan permukiman yang kumuh, yang dimaksud dalam hal ini terbentuknya suatu kelompok/organisasi/lembaga yang dibentuk oleh Kotaku untuk mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Program Kotaku sendiri telah membentuk BKM di Kelurahan Ujung Lare bernama BKM Gotong Royong yang berfungsi untuk mengkoordinir penanganan kumuh yang ada di Kelurahan Ujung Lare khususnya yang ada di delinasi kumuh.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Kementerian PUPR No: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Widyoko, Eko Putro. 2010. *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik Dan Calon Pendidik*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare dinilai cukup efektif, tidak efisien, berdampak/bermanfaat, cukup responsivitas, dan cukup tepat dalam pelaksanaan program, selanjutnya berdasarkan hasil analisis evaluasi Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare selanjutnya diolah menggunakan analisis SWOT, menghasilkan arahan untuk Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare, yaitu membentuk rancangan anggaran untuk penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh khususnya pada penanganan aspek non fisik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat agar luasan permukiman kumuh semakin berkurang dan MBR berkurang.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2020. BPS Kota Parepare tahun 2020.
- Arikunto, S. & Jabar Abdul S.C. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia.
- Fernandes, A. A., & Solimun, S. (2018). The Mediation Effect Of Customer Satisfaction In The Relationship Between Service Quality, Service Orientation, And Marketing Mix Strategy To Customer Loyalty, 37(1), 76-87.
- Hadari Nawawi. (1990). *Administrasi Personil: Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Haji Masagung.
- Isaac, S., & Michael, W.B. (1981). *Handbook in research and evaluation*. California: Edits Publishers.
- Langbein, Laura Irwin, 1980. *Discovering Whether Programs Work: A Guide to Statical Methods for Program Evaluation*. California: Goodyear Publishing Company.
- Koestoer et all. 2001. *Dimensi Keruangan Kota: Teori dan Khusus*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Muchsin, Fadillah Putra, 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Universitas Sunan Giri. Surabaya.
- Rangkuti, F. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, Dan OCAAL*. Jakarta: pt.Gramedia Pustaka Umum.
- Suparlan, 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori sampai dengan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.